

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan ekowisata berkelanjutan membutuhkan landasan teori yang kuat agar dapat menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pada bab ini akan diuraikan berbagai konsep dan penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian.

1.1 Pariwisata

Pariwisata telah menjadi salah satu sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, serta pembangunan berkelanjutan di berbagai negara. Terdapat beberapa pengertian pariwisata. Menurut (UNTWO, 2025a) pariwisata merupakan fenomena sosial, budaya dan ekonomi yang melibatkan pergerakan orang ke tempat-tempat di luar lingkungan biasa mereka untuk tujuan pribadi atau bisnis, serta kegiatan yang dilakukan selama mereka tinggal di tempat-tempat tersebut. Sedangkan menurut Prayogo & Febrianita, (2018) pariwisata sebagai perjalanan seseorang atau sekelompok orang dari satu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan rekreasi dan hiburan. Definisi ini menyoroti aspek perjalanan dan tujuan rekreatif dari kegiatan pariwisata, dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah daerah. Ketentuan perundang-undangan tersebut menekankan bahwa pariwisata merupakan sistem yang melibatkan berbagai aktor dan komponen secara terintegrasi baik dari sisi aktivitas wisatawan, penyedia layanan, hingga kebijakan pemerintah. Pariwisata tidak hanya mencakup perjalanan rekreatif, tetapi juga aktivitas yang bersifat edukatif, kultural, spiritual,

hingga profesional (Cooper et al., 2008). Tingginya antusiasme masyarakat terhadap kegiatan pariwisata turut memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi lingkungan, sehingga pengelolaan yang berkelanjutan menjadi aspek krusial dalam sistem kepariwisataan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan individu atau kelompok untuk tujuan rekreasi, edukasi, bisnis, atau spiritual, yang melibatkan interaksi antar pelaku dan didukung oleh sistem layanan, fasilitas, serta kebijakan, dengan dampak terhadap ekonomi, budaya, dan lingkungan yang perlu dikelola secara berkelanjutan.

Secara lebih luas, ruang lingkup pariwisata meliputi berbagai aspek yang saling berkaitan, termasuk unsur wisatawan, destinasi, aksesibilitas, fasilitas serta aktivitas yang dilakukan (Richards, 2011). Buckley (2011) menegaskan bahwa pariwisata adalah industri global yang menyumbang dampak signifikan secara ekonomi dan lingkungan, mencakup konsumsi energi dari transportasi, pembangunan akomodasi, serta tekanan terhadap ekosistem lokal. Oleh karena itu, pariwisata tidak hanya berkaitan dengan aktivitas rekreasi, tetapi juga merupakan fenomena lintas sektor yang memiliki dimensi ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan. Dimensi ekonomi mencakup kontribusi terhadap pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan konsumsi domestik melalui aktivitas pariwisata (Lazuardina & Amalia G., 2023). Dimensi sosial-budaya terlihat dalam proses pertukaran nilai, pelestarian budaya lokal, hingga transformasi gaya hidup masyarakat. Sementara itu, dimensi lingkungan menyoroti dampak pariwisata terhadap ekosistem, seperti degradasi sumber daya alam, perubahan tata guna lahan, dan meningkatnya tekanan terhadap daya dukung lingkungan (Buckley, 2011). Oleh karena itu, pendekatan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan serta budaya lokal.

1.2 Pariwisata Berkelanjutan

Pariwisata berkelanjutan merupakan pendekatan dalam pengembangan pariwisata yang mengutamakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat lokal. Hall (2011) menyatakan bahwa pariwisata berkelanjutan telah ada sejak tahun 1980-an dan sudah menjadi bagian penting dalam kebijakan serta penelitian pariwisata. Konsep ini muncul sebagai respon terhadap dampak negatif pariwisata massal, seperti degradasi lingkungan, ketimpangan sosial, hingga kapasitas berlebihan dari destinasi wisata (Bramwell & Lane, 2011).

Mengutip dari *World Tourism Organization* (UNWTO), pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang sepenuhnya memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan di masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan komunitas tuan rumah (UNWTO, 2025). Dengan kata lain, tujuan utama dari pariwisata berkelanjutan adalah untuk menciptakan manfaat jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan tanpa mengorbankan potensi masa depan destinasi wisata. Sejalan dengan hal tersebut, Budeanu et al., (2015) juga menyatakan bahwa pariwisata berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menekankan keseimbangan antara dimensi lingkungan, sosial dan ekonomi.

Bramwell & Lane, (2011) mengidentifikasi tiga pilar utama pariwisata berkelanjutan antara lain:

1. Keberlanjutan ekonomi, yakni pariwisata harus memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat lokal, menciptakan peluang usaha, serta peningkatan pendapatan daerah.
2. Keberlanjutan sosial dan budaya, yakni pariwisata harus menghormati dan melestarikan budaya lokal, menghindari eksploitasi budaya, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata.

3. Keberlanjutan lingkungan, yakni kegiatan pariwisata harus menjaga kelestarian lingkungan, meminimalisasi limbah, mencegah degradasi ekosistem, serta mengelola daya dukung lingkungan.

Selain tiga pilar tersebut, pengembangan pariwisata berkelanjutan juga perlu mengacu pada prinsip operasional pariwisata berkelanjutan. Prinsip operasional pariwisata berkelanjutan telah distandarisasi oleh *Global Sustainable Tourism Council* (GSTC) yang terdiri dari (1) perencanaan yang partisipatif, (2) keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, (3) perlindungan keanekaragaman hayati, (4) pengelolaan sumber daya alam secara efisien, dan (5) penyediaan pengalaman wisata yang autentik bagi pengunjung (*Global Sustainable Tourism Council*, 2019). Prinsip ini menjadi pedoman internasional yang dapat diadaptasi oleh destinasi wisata untuk memastikan pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan.

Implementasi pariwisata berkelanjutan tidak terlepas dari tantangan seperti keterbatasan sumberdaya, rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan, serta potensi konflik kepentingan antar pemangku kepentingan (Budeanu et al., 2015; Mihalic, 2016). Oleh karena itu implementasi pariwisata berkelanjutan diwujudkan melalui langkah-langkah strategis, seperti pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pengelolaan, penerapan indikator keberlanjutan yang terukur, pemantauan kualitas lingkungan secara berkala, penguatan kapasitas sumber daya manusia lokal, serta penegakan regulasi yang konsisten (*Global Sustainable Tourism Council*, 2019).

Berbagai studi menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi pariwisata berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh integrasi antara perencanaan strategis, regulasi yang kuat, dan keterlibatan masyarakat. Courvisanos & Jain, (2006) dalam penelitiannya di Costa Rica mencatat bahwa, keberhasilan ekowisata didorong oleh kombinasi kebijakan publik

pro-lingkungan , penerapan sertifikasi *Certificate for Sustainable Tourism* (CST), serta keterlibatan masyarakat dalam konservasi taman nasional, yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian ekosistem. Di Indonesia, penelitian Ginting et al., (2023) di Bali menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan penyediaan fasilitas wisata, secara signifikan meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal dalam kerangka pariwisata berkelanjutan. Pertumbuhan sektor pariwisata yang dapat menimbulkan tekanan pada lingkungan, tetapi strategi berbasis keberlanjutan, seperti pengendalian limbah dan pelibatan masyarakat dapat mengurangi dampak negatif tersebut (Sinulingga et al., 2024). Upaya Indonesia untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam pengembangan destinasi dilaksanakan melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 9 tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Peraturan ini memberikan pedoman bagi pembangunan destinasi pariwisata melalui standar, kriteria, dan indikator destinasi pariwisata berkelanjutan yang harus dipenuhi. Sejalan dengan hal tersebut penelitian Sana (2025) juga menegaskan bahwa strategi pengelolaan pariwisata berkelanjutan di destinasi wisata alam Indonesia perlu menekankan konservasi berbasis ekowisata, penerapan konsep zero waste tourism, pemberdayaan masyarakat lokal, serta edukasi wisatawan mengenai praktik wisata bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan pariwisata berkelanjutan di berbagai konteks menekankan pentingnya keseimbangan antara manfaat ekonomi, konservasi lingkungan, dan keterlibatan komunitas.

1.3 Lingkungan Hidup dan Relevansinya dalam Pariwisata Berkelanjutan

Lingkungan hidup merupakan elemen fundamental dalam kehidupan makhluk hidup. Menurut Otto Soemarwoto (1977) lingkungan adalah keseluruhan benda dan kondisi, termasuk manusia dan perilakunya, yang terdapat dalam suatu ruang dan mempengaruhi kelangsungan hidup

manusia serta makhluk hidup lainnya (Siahaan, 2004). Definisi ini turut ditegaskan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia. Berdasarkan kedua definisi tersebut, dapat dipahami bahwa lingkungan hidup merupakan satu kesatuan ruang yang mencakup unsur alam dan manusia beserta interaksinya, yang secara langsung mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan makhluk hidup. Dengan pemahaman tersebut, penting untuk menyoroti mengapa keberadaan lingkungan hidup yang lestari menjadi aspek mendasar dalam mendukung kualitas hidup dan stabilitas ekologi.

Menjaga lingkungan hidup menjadi hal yang krusial dalam mendukung keberlangsungan seluruh sistem kehidupan. Lingkungan yang sehat tidak hanya berkontribusi terhadap kualitas hidup manusia, namun juga menjadi penyangga dalam sistem ekologis dan sosial. Aktivitas manusia yang tidak disertai dengan kesadaran dan kontrol lingkungan dapat meningkatkan tekanan terhadap lingkungan hidup. Urbanisasi yang masif, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, limbah industri, perubahan penggunaan lahan, serta pembangunan infrastruktur yang mengabaikan kaidah lingkungan telah menyebabkan berbagai bentuk degradasi lingkungan seperti pencemaran air dan udara, penurunan keanekaragaman hayati, hingga perubahan iklim. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara aktivitas pembangunan dan daya dukung lingkungan dapat memicu gangguan ekologis yang luas dan berdampak langsung terhadap keberlanjutan hidup manusia (Melo et al., 2024).

Fenomena ini juga semakin kompleks dalam konteks pariwisata. Aktivitas pariwisata merupakan salah satu bentuk kegiatan manusia yang apabila tidak dikelola dengan prinsip keberlanjutan, berpotensi menciptakan

tekanan ekologis terhadap kualitas udara, air dan tanah. Kehadiran dan peningkatan jumlah wisatawan dalam suatu kawasan, pembangunan fasilitas wisata yang intensif, serta aktivitas konsumtif selama kegiatan wisata dapat meningkatkan beban pencemaran lingkungan. Menurut Wahyuningtias et al (2019) (dalam Abas et al., 2022), salah satu ancaman yang paling nyata dalam konteks pariwisata berbasis sumber air adalah penurunan kualitas air akibat peningkatan aktivitas wisatawan, terutama pada lokasi wisata terbuka yang rentan terhadap masuknya limbah domestik dan biologis.

Pariwisata yang berbasis alam, seperti ekowisata, memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan keberlangsungan lingkungan hidup. penelitian yang dilakukan oleh Said et al., (2021) menemukan tingginya kandungan bakteri coliform pada kolam renang akibat limbah biologis dari aktivitas pengunjung, yang beresiko menyebabkan gangguan kesehatan seperti diare. Kasus serupa juga ditemukan oleh Flores-Díaz et al., (2018) dalam penelitiannya di kawasan konservasi Meksiko, dimana monitoring berbasis komunitas menunjukkan bahwa sumber mata air yang tidak dikelola dengan baik memiliki kadar *Escherichia coli* yang melampaui batas aman untuk di konsumsi dan rekreasi. Kedua kasus tersebut menekankan pentingnya sistem pemantauan kualitas air yang partisipatif sebagai bagian dari kebijakan konservasi destinasi wisata.

1.4 Ekowisata

Ekowisata merupakan salah satu bentuk pariwisata berkelanjutan yang semakin mendapat perhatian dalam pengelolaan pariwisata modern. Ekowisata menempatkan pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan edukasi sebagai tiga komponen utama dalam setiap aktivitas wisata. Menurut (Fennel, 2020), ekowisata didefinisikan sebagai bentuk perjalanan wisata yang bertanggung jawab ke wilayah-wilayah alami dengan tujuan untuk menikmati dan menghargai alam beserta segala aspek budaya yang mendukungnya, yang pada akhirnya memberikan

manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal serta mendorong upaya pelestarian lingkungan.

Definisi serupa juga dikemukakan oleh *The International Ecotourism Society* (TIES), yang mendeskripsikan ekowisata sebagai

“responsible travel to natural areas that conserves the environment, sustain the well-being of the local people, and involves interpretation and education” (*The International Ecotourism Society*, n.d.).

Dengan demikian, ekowisata bukan sekedar kegiatan rekreasi alam, namun juga membawa misi sosial dan konservasi.

Weaver, (2001) menyatakan bahwa ekowisata memiliki beberapa prinsip dasar yang membedakannya dari bentuk pariwisata lainnya :

1. Konservasi lingkungan

Aktivitas ekowisata harus mengedepankan upaya perlindungan lingkungan hidup, termasuk keanekaragaman hayati, ekosistem, serta sumber daya alam yang ada di destinasi.

2. Partisipasi masyarakat lokal.

Kegiatan ekowisata harus melibatkan masyarakat setempat secara aktif dalam perencanaan, pengembangan dan pengelolaan ekowisata sehingga masyarakat dapat ikut merasakan manfaat keberadaan ekowisata dan menjadi bagian dari solusi pelestarian.

3. Pendidikan dan kesadaran lingkungan

Aktivitas wisata harus memberikan pengalaman edukatif yang meningkatkan pemahaman wisatawan terhadap alam, budaya lokal dan pentingnya konservasi.

4. Pemberdayaan ekonomi lokal

Kegiatan ekowisata harus dapat mengubah potensi sumber daya alam dan budaya menjadi sumber ekonomi yang dikelola oleh masyarakat lokal, sehingga mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Selain itu, Fennel (2020) juga menekankan pentingnya aspek etika dalam ekowisata, dimana hubungan antara manusia dan alam harus didasarkan pada rasa hormat dan tanggung jawab bersama.

Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat (*Community-Based Ecotourism*) merupakan salah satu strategi utama dalam mewujudkan ekowisata berkelanjutan yang tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal. Menurut Iqbal et al., (2021), pengelolaan ekowisata di Desa Wisata Nglanggeran, Yogyakarta, menjadi contoh implementasi CBE yang berhasil. Dalam studi tersebut, ditemukan bahwa Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata), organisasi kepemudaan, pelaku usaha kecil, dan masyarakat lokal memiliki peran vital dalam mendukung pengembangan dan pelestarian kawasan ekowisata. Keberhasilan pengelolaan ini ditunjang oleh tingginya kesadaran masyarakat, sistem kelembagaan yang kolaboratif, serta penerapan prinsip ekowisata yang mencakup penghormatan terhadap lingkungan dan budaya lokal. Pengelolaan ekowisata secara partisipatif terbukti mampu menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan konservasi yang seimbang, sekaligus memperkuat identitas lokal masyarakat setempat.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Wiratno et al., (2022) di kawasan penyangga Taman Nasional Gunung Leuser, Sumatera Utara, mengungkapkan bahwa kolaborasi adaptif antara pengelola taman nasional dan masyarakat lokal melalui pengembangan ekowisata berbasis masyarakat terbukti efektif dalam menjaga kelestarian kawasan konservasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Studi tersebut menunjukkan bahwa inisiatif ekowisata yang dikelola oleh Lembaga Pariwisata Tangkahan (LPT) mampu mengurangi praktik ilegal seperti penebangan liar dan perambahan, serta memberikan alternatif pendapatan bagi masyarakat.

Meskipun ekowisata menjadi salah satu pendekatan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa

implementasinya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan signifikan. Penelitian oleh Kurniawan et al., (2023) di destinasi Ulem-Ulem, Desa Tetebatu, Lombok Timur, mengungkapkan beberapa kelemahan utama dalam pengembangan ekowisata. Tantangan tersebut mencakup rendahnya pemahaman masyarakat lokal mengenai konsep ekowisata, kurang optimalnya pengelolaan kawasan hutan dan lingkungan sekitar, lemahnya koordinasi antar sektor, serta belum adanya perencanaan sistematis terkait pengelolaan sampah dan promosi destinasi. Selain itu, minimnya SDM berpengalaman di bidang pariwisata dan belum adanya sinergi antara pemerintah, Pokdarwis, dan masyarakat menjadi faktor penghambat utama.

Temuan serupa juga diungkapkan oleh Muqsith et al., (2023) dalam studi mereka di kawasan ekowisata Situ Gunung, Sukabumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan terbesar dalam implementasi ekowisata di kawasan tersebut adalah minimnya kolaborasi antara pengelola, masyarakat lokal, pemerintah, dan sektor swasta. Selain itu, orientasi stakeholder yang lebih berfokus pada aspek ekonomi, seperti peningkatan pendapatan masyarakat dan pengembangan UMKM, menyebabkan aspek lingkungan, seperti pengelolaan sampah dan konservasi, menjadi kurang mendapat perhatian. Kesenjangan kepentingan serta lemahnya sinergi antarpihak berdampak pada belum optimalnya penerapan prinsip keberlanjutan di kawasan tersebut.

Studi tersebut menegaskan bahwa keberhasilan implementasi ekowisata sangat bergantung pada tiga hal utama: peningkatan kapasitas SDM lokal, perencanaan terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta penguatan kesadaran dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan.

1.5 Triple Bottom Line (TBL) Theory

Konsep *Triple Bottom Line* (TBL) diperkenalkan oleh John Elkington pada tahun 1997 sebagai kerangka kerja untuk mengevaluasi keberhasilan suatu organisasi atau proyek tidak hanya berdasarkan aspek

ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial dan lingkungan (Elkington, 1997). Teori ini menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan harus mempertimbangkan tiga pilar utama, yaitu *profit* (ekonomi), *people* (sosial), dan *planet* (lingkungan).

Profit (ekonomi), adalah aspek ekonomi yang tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial jangka pendek, namun juga pada bagaimana aktivitas ekonomi dapat memberikan dampak positif bagi komunitas lokal, menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan (Slaper & Hall, 2011). *People* (sosial) merupakan pilar yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan, pemberdayaan komunitas, serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Dalam konteks ekowisata, keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata menjadi indikator utama keberhasilan dimensi sosial (Norman & MacDonald, 2004). Sedangkan *planet* (lingkungan), adalah pilar lingkungan yang berfokus pada upaya pelestarian sumber daya alam, pengelolaan limbah, konservasi keanekaragaman hayati, serta pengurangan dampak negatif aktivitas manusia terhadap ekosistem. Dalam praktiknya, pengelolaan daya dukung lingkungan seperti kualitas air, tanah, dan udara menjadi perhatian utama dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan (Elkington, 1997).

Penerapan *Triple Bottom Line Theory* sangat relevan dalam pengelolaan ekowisata. Pengelolaan ekowisata tidak dapat hanya mengejar keuntungan ekonomi dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, namun keseimbangan antara pemberdayaan masyarakat lokal sebagai pelaku utama (*people*), menjaga kualitas lingkungan khususnya kualitas air (*planet*), serta meningkatkan manfaat ekonomi lokal (*profit*) menjadi kunci utama dalam mencapai keberlanjutan. Stoddard et al., (2012) menjelaskan bahwa organisasi atau pengelola destinasi yang mengadopsi TBL secara efektif akan mendapatkan manfaat seperti efisiensi operasional, peningkatan hubungan dengan stakeholder, dan pengambilan keputusan strategis yang lebih baik. Wise, (2016) juga menunjukkan bahwa penerapan

TBL tidak hanya relevan dalam konteks bisnis, tetapi juga dalam pengembangan kebijakan regenerasi pariwisata di wilayah urban dan rural, di mana keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat harus selalu dijaga

1.6 Strategi Pengelolaan Ekowisata

Pengelolaan ekowisata yang efektif memerlukan strategi yang komprehensif, mengintegrasikan upaya konservasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, serta peningkatan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Strategi pengelolaan ekowisata harus mampu menyeimbangkan antara aspek ekologi, sosial, dan ekonomi agar tujuan keberlanjutan dapat tercapai (Arfan et al., 2022). Beberapa strategi pengelolaan ekowisata yang dapat diterapkan diantaranya:

1. Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Lokal

Partisipasi masyarakat lokal menjadi salah satu elemen penting dalam strategi pengelolaan ekowisata. Pengembangan ekowisata berbasis komunitas (*Community-Based Ecotourism*) menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam pengelolaan destinasi wisata. Lelloltery et al., (2020) dalam penelitiannya di Hutan Lindung Gunung Sirimau, Ambon, menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan ekowisata seperti pemandu wisata, pengelolaan homestay, dan penyedia jasa kuliner lokal mampu meningkatkan rasa memiliki serta kesejahteraan masyarakat setempat.

2. Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung

Infrastruktur pendukung yang ramah lingkungan, seperti jalur trekking, pusat informasi ekowisata, serta fasilitas sanitasi yang memadai, turut menjadi bagian penting dalam strategi pengelolaan. Arfan et al., (2022) dalam studi mengenai ekowisata mangrove di Pulau Bangkobangkoang menyoroti pentingnya pembangunan fasilitas pendukung yang tidak hanya

meningkatkan kenyamanan wisatawan, tetapi juga mendukung konservasi lingkungan sekitar

3. Edukasi dan Kesadaran Lingkungan

Peningkatan kesadaran lingkungan dan edukasi bagi masyarakat lokal maupun wisatawan merupakan salah satu strategi kunci dalam pengelolaan ekowisata berkelanjutan. Putra et al., (2015) dalam studinya mengenai pengembangan ekowisata mangrove di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, menunjukkan bahwa pemberian pengetahuan kepada masyarakat mengenai pengelolaan dan pelatihan manajemen ekowisata mangrove secara efektif sangat penting. Melalui edukasi tersebut, masyarakat dibekali dengan kemampuan untuk menjalankan kegiatan ekowisata berbasis konservasi, meningkatkan kapasitas dalam mengelola wisata mangrove, serta memahami dampak aktivitas wisata terhadap lingkungan.

4. Pengelolaan Berbasis Konservasi

Kegiatan ekowisata harus sejalan dengan upaya konservasi sumber daya alam. Piri et al., (2019) menegaskan bahwa strategi pengembangan ekowisata di Pantai Firdaus, Desa Kema Dua, menempatkan konservasi lingkungan sebagai prioritas utama untuk memastikan keberlanjutan ekosistem wisata alam tersebut.

5. Pemasaran dan Promosi Berkelanjutan

Strategi pemasaran yang tepat juga menjadi bagian dari pengelolaan ekowisata yang efektif. Akbar et al., (2023) menggarisbawahi pentingnya promosi berkelanjutan yang menargetkan wisatawan peduli lingkungan, melalui penggunaan media digital, partisipasi dalam pameran pariwisata, serta kolaborasi dengan agen perjalanan berbasis ekowisata

Dalam pengelolaan ekowisata, stratego-strategi di atas sangat relevan untuk diterapkan. Dalam konteks strategi pengelolaan ekowisata di Umbul Brintik, Pengelolaan berbasis konservasi kualitas air, pemberdayaan

masyarakat lokal melalui BUMDes, pengembangan infrastruktur ramah lingkungan, serta edukasi kepada wisatawan mengenai pelestarian mata air menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan ekowisata Umbul Brintik.

1.7 Kualitas Air dalam Ekowisata

Kualitas air merupakan kondisi fisik, kimia dan biologi yang menentukan tingkat kesesuaiannya terhadap suatu peruntukan, termasuk rekreasi dan kegiatan wisata berbasis air. Dalam konteks ekowisata, kualitas air menjadi unsur penting karena berpengaruh langsung terhadap keamanan dan kesehatan pengunjung, kenyamanan visual dan keberlanjutan ekosistem perairan (Ramadhan et al., 2023; Suharyono & Digdowiseiso, 2020). WHO (2021) menegaskan bahwa perairan rekreasi yang bersih, jernih, dan aman tidak hanya menurunkan risiko penyakit akibat air, tetapi juga meningkatkan pengalaman wisata dan daya tarik destinasi. Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian yang menyarakan bahwa penurunan kualitas air, misalnya meningkatnya kekeruhan, bakteri indikator tinja, atau nutrisi berlebih dapat mengurangi minat kunjungan dan merusak citra destinasi (Adeniji et al., 2019; C. Wang et al., 2023).

Dalam ekowisata berbasis mata air, kualitas air menjadi hal yang sangat penting karena mata air sering dipersepsikan sebagai air “murni”, sehingga berupahan kecil pada kejernihan, warna atau bau dapat langsung menurunkan nilai estetika dan persepsi kebersihan. Studi di Umbul Ponggok dan Air Terju Jumog menunjukkan bahwa ketika pengunjung dikondisikan dengan baik, parameter kualitas air seperti pH, suhu, TDS, dan konduktivitas tetap stabil dan masih berada dalam batas aman untuk dijadikan obyek wisata air (Abas et al., 2022), hal ini menandakan bahwa ekowisata berbasis mata air memiliki resiliensi tinggi selama aktivitas wisata dikelola dengan memperhatikan daya dukung ekologis.

Parameter kualitas yang digunakan untuk menilai kelayakan destinasi wisata air harus mengacu pas standar yang berlaku, salah satunya

adalah baku mutu air untuk keperluan Higene dan Sanitasi yang tertuang pada Permenkes No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Regulasi ini menetapkan batas aman bagi berbagai parameter fisika, kimia, dan biologi.

Tabel 1. Parameter Air untuk Keperluan Higene dan Sanitasi

No.	Jenis Parameter	Kadar maksimum yang diperbolehkan	Satuan	Metode Pengujian
Mikrobiologi				
1	<i>Escherichia coli</i>	0	CFU/100ml	SNI/ APHA
2	<i>Total Coliform</i>	0	CFU/100ml	SNI/ APHA
Fisika				
3	Suhu	Suhu udara ± 3	$^{\circ}\text{C}$	SNI/ APHA
4	Total Dissolve Solid (TDS)	<300	mg/L	SNI/ APHA
5	Kekeruhan	<3	NTU	SNI atau yang setara
6	Warna	10	TCU	SNI/ APHA
7	Bau	Tidak berbau	-	APHA
Kimia				
8	pH	6,5 – 8,5	-	SNI/ APHA
9	Nitrat (sebagai NO_3 terlarut)	20	mg/L	SNI/ APHA
10	Nitrit (sebagai NO_2 terlarut)	3	mg/L	SNI/ APHA
11	Kromium valensi 6 (Cr^{6+} terlarut)	0,01	mg/L	SNI/ APHA
12	Besi (Fe terlarut)	0,2	mg/L	SNI/ APHA
13	Mangan (Mn terlarut)	0,1	mg/L	SNI/ APHA

Sumber: Permenkes No. 2 Tahun 2023

Parameter fisika, kimia dan biologi memiliki fungsi dan keterkaitan satu sama lain dalam menentukan kualitas air. Keterkaitan antar parameter ini menegaskan bahwa pengelolaan ekowisata tidak cukup hanya mengawasi satu indikator saja, tetapi memerlukan pendekatan kualitas air yang holistik. Studi ekowisata sungai Prafi di Papu Barat misalnya, menunjukkan bahwa perubahan kualitas fisika – kimia (suhu, DO, kekeruhan, nutrien) berpengaruh langsung terhadap komposisi *makrozoobentos* sebagai bioindikator ekologi (Sinuraya et al., 2018), sehingga kualitas air berfungsi sebagai fondasi yang menjaga stabilitas ekosistem sekaligus keberlanjutan wisata.

Dengan demikian, kualitas air menjadi pilar utama bagi pengembangan dan keberlanjutan ekowisata berbasis mata air. Mata air umumnya memiliki karakteristik alami yang mendukung wisata, namun sangat sensitif terhadap tekanan wisata, limbah domestik dan perubahan penggunaan lahan. Pemantauan kualitas air berdasarkan Permenkes No. 2 Tahun 2023 merupakan langkah strategis untuk memastikan destinasi tetap aman, menarik dan ekologis. Destinasi yang menjaga kualitas air secara konsisten tidak hanya mempertahankan fungsi ekologisnya, tetapi juga memperkuat daya tarik wisata dan kepuasan pengunjung dalam jangka panjang.

1.8 Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Ekowisata

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi suatu program pembangunan. Secara konsep, partisipasi dipahami sebagai sebuah proses dimana masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat melainkan juga aktor yang berkontribusi nyata terhadap keberhasilan program (Arnstein, 1969). Pada konteks pembangunan daerah, partisipasi dianggap penting karena meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*), memperkuat kapasitas lokal, dan memastikan bahwa program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat (Setiawan et al., 2024). Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Nurbaiti & Bambang (2017) menunjukkan bahwa tingkat keberlanjutan suatu program sangat dipengaruhi oleh kualitas partisipasi warganya. Partisipasi yang kuat dapat mendorong efektivitas kebijakan, mengurangi konflik, dan memperkuat legitimasi pengambilan keputusan.

Dalam sektor pariwisata, partisipasi masyarakat menjadi komponen inti karena pariwisata adalah aktivitas sosial yang melekat pada ruang hidup manusia (Mardianto et al., 2024). Penguatan partisipasi tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan wisata, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan mendorong pemerataan manfaat ekonomi. Banyak studi

menegaskan bahwa destinasi wisata yang dikelola melalui kolaborasi pemerintah–pengelola–masyarakat cenderung lebih stabil secara sosial, lebih adaptif, dan lebih berkelanjutan (Amin et al., 2020; Dangi & Petrick, 2021). Di dalam ekowisata, partisipasi masyarakat menjadi lebih penting karena ekowisata mengedepankan konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari. Menurut Garrod (2003), partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan dan manajemen ekowisata menjadi faktor penentu keberhasilan program ekowisata. Dangi & Petrick (2021) lebih lanjut menyatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas konservasi dan pengalaman wisata. ketika masyarakat berperan sebagai pengelola, penjaga lingkungan, dan penyedia jasa wisata, keberlanjutan destinasi meningkat secara signifikan.

Cohen & Uphoff (1980) memberikan kerangka yang lebih operasional mengenai partisipasi masyarakat. Kerangka ini memiliki 4 tahapan partisipasi :

1. Partisipasi dalam perencanaan, dimana masyarakat terlibat dalam merumuskan kebutuhan, prioritas, serta penyusunan strategi;
2. Partisipasi dalam pelaksanaan, yakni kontribusi masyarakat melalui tenaga, waktu, pengetahuan lokal, dan keterlibatan langsung dalam kegiatan wisata;
3. Partisipasi dalam pengambilan atau penerimaan manfaat, yakni sejauh mana masyarakat memperoleh manfaat sosial, ekonomi, maupun ekologis dari aktivitas wisata;
4. Partisipasi dalam evaluasi, yakni keterlibatan masyarakat dalam memantau, mengawasi dan memberikan masukan terhadap jalannya program.

Kerangka ini banyak digunakan dalam penelitian pariwisata karena mampu menggambarkan dinamika hubungan antara masyarakat dengan pengelolaan destinasi. Dangi & Jamal (2016) menjelaskan bahwa destinasi dengan keterlibatan masyarakat yang kuat di keempat tahapan tersebut

cenderung memiliki kelestarian lingkungan yang lebih baik dan distribusi manfaat yang merata.

1.9 *Participatory Culture*

Konsep *participatory culture* atau budaya partisipatif merupakan pendekatan yang berkembang dari kajian media dan budaya kontemporer, yang berfokus pada keterlibatan aktif individu atau komunitas dalam menciptakan, membagikan, dan memaknai konten serta tindakan sosial. Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh Henry Jenkins (2006) dalam bukunya “*Convergence Culture*”, yang menyoroti bagaimana masyarakat telah berpindah dari posisi pasif sebagai konsumen media menjadi aktor aktif yang turut membentuk narasi, nilai, dan sistem sosial. Budaya partisipatif mendorong adanya keterbukaan dalam mengekspresikan diri, kolaborasi antar anggota komunitas, serta distribusi peran secara horizontal dalam proses produksi pengetahuan dan tindakan kolektif.

Penerapan budaya partisipatif kini berkembang pesat dalam berbagai sektor, termasuk pariwisata. Salah satu manifestasi nyatanya tampak dalam praktik promosi destinasi melalui platform video digital seperti YouTube, Instagram dan lainnya. Arabela Briciu & Victor-Alexandru Briciu (2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa konten yang dihasilkan oleh pengguna (*user-generated content*) di YouTube berperan penting dalam membentuk pengalaman dan persepsi wisatawan terhadap suatu destinasi. Dalam konteks ini, wisatawan tidak hanya berperan sebagai konsumen informasi wisata, tetapi juga sebagai produsen konten yang secara aktif menciptakan narasi visual dan reflektif tentang destinasi yang mereka kunjungi. Penelitian ini menunjukkan bahwa budaya partisipatif di YouTube memberikan dampak positif dalam membangun keterlibatan emosional wisatawan, meningkatkan niat berkunjung, dan memperkuat kredibilitas promosi wisata yang bersumber dari pengalaman nyata, bukan dari iklan formal institusi.

Studi oleh Loisa et al., (2021) juga memperlihatkan bagaimana masyarakat kini berperan aktif dalam menciptakan, membagikan, dan menafsirkan konten wisata. Budaya partisipatif diwujudkan dalam bentuk unggahan visual, narasi reflektif, penggunaan tagar, dan interaksi antar pengguna. Partisipasi digital bukan hanya memperluas jangkauan distribusi informasi, tetapi juga menciptakan hubungan emosional dan simbolik yang lebih kuat antara masyarakat dan destinasi yang dipromosikan

Dalam konteks pengelolaan ekowisata berkelanjutan, partisipasi masyarakat menjadi faktor krusial yang menentukan keberhasilan pengelolaan lingkungan, ekonomi lokal, dan pelestarian budaya. Ekowisata yang berkelanjutan mendorong adanya pengelolaan yang berbasis komunitas, di mana masyarakat lokal tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi juga berperan sebagai aktor utama dalam perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan (Fennel, 2020).

Teori participatory culture dapat diaplikasikan dalam memahami dinamika pengelolaan ekowisata di Umbul Brintik, Klaten. Partisipasi masyarakat di kawasan tersebut mencakup berbagai aktivitas, mulai dari pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), keterlibatan dalam pelestarian sumber daya air, pengelolaan sampah wisata, hingga promosi destinasi melalui media sosial secara mandiri oleh warga. Aktivitas ini menunjukkan bahwa partisipasi tidak hanya hadir dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk digital dan simbolik, sesuai dengan prinsip participatory culture